

Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait dengan Diplomasi di Kawasan Timur Tengah (Studi Hubungan United Arab Emirates - Israel)

Nur Rizki Eka Putra¹, Rakha Ridhyu Rasyadan², Nur Achmada Shaka Ramadhan³, Intan Safitri⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bung Karno
Jl. Pegangsaan Timur No. 17 Menteng, Jakarta, Indonesia 10310
E-mail Korespondensi : nurrizki2223344@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the Indonesian Government's Policy Related to Diplomacy in the Middle East Region. The aim of the research is to understand the origins of the UAE-Israel relationship, the normalization process, and its implications for Southeast Asian countries, particularly in the context of Indonesian policy. The method used is library research with qualitative descriptive analysis, relying on secondary data from various literature sources. The results of the research show that the normalization of this relationship has created a positive climate for cooperation between the UAE and Southeast Asian countries, especially Indonesia, which also plays an important role. However, this normalization process has also triggered opposition from several countries that consider it contrary to their commitment to Palestine. The recommendation of this research is that both Indonesia and the UAE can act as more active mediators in resolving the Israel-Palestine conflict and enhance economic and diplomatic cooperation with Southeast Asian countries to create regional stability.

Keyword : *Diplomatic Relations, United Arab Emirates, Government Policy*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait dengan Diplomasi di Kawasan Timur Tengah. Tujuan penelitian adalah untuk memahami awal mula terbentuknya hubungan UEA-Israel, proses normalisasi, serta implikasinya bagi negara-negara di Asia Tenggara khususnya dalam konteks kebijakan Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan analisis deskriptif kualitatif, mengandalkan data sekunder dari berbagai sumber literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa normalisasi hubungan ini telah menciptakan iklim positif bagi kerjasama antara UEA dan negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia yang juga memiliki peranan penting. Namun, proses normalisasi ini juga memicu kontra dari beberapa negara yang menganggapnya bertentangan dengan komitmen terhadap Palestina. Rekomendasi penelitian ini adalah agar Indonesia maupun UEA dapat berperan sebagai mediator yang lebih aktif dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina dan meningkatkan kerjasama ekonomi dan diplomatik dengan negara-negara Asia Tenggara untuk menciptakan stabilitas regional.

Kata Kunci: Hubungan Diplomasi, United Emirat Arab (UEA), Kebijakan Pemerintah

1. PENDAHULUAN

Dunia Internasional yang terdiri dari berbagai negara tidak bisa terlepas dari adanya hubungan-hubungan yang terjalin dengan negara-negara lain. Hubungan ini sebagai bentuk relasi internasional yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama internasional dengan tujuan-tujuan tertentu. Tujuan tersebut misalnya tujuan dagang, politik, dan bahkan pertukaran informasi politik serta tujuan-tujuan lainnya. Hal inilah yang juga mendorong adanya hubungan diplomasi yang terjalin antara Uni Emirat Arab dengan Israel sebagai salah satu negara dengan segudang konflik yang dimilikinya. Adapun konflik yang terjadi dalam diri Israel adalah persetujuan yang terjadi selama bertahun-tahun dengan Palestina sebagai akibat dari konflik perebutan wilayah yang sudah terjadi sejak adanya Perang Dunia I. Konflik ini merupakan dampak dari adanya penyerahan wilayah Palestina oleh Inggris kepada bangsa Yahudi, yaitu masyarakat dengan agama samawi yang kemudian menganggap bahwasanya Palestina telah menjadi milik masyarakat bangsa Yahudi. Namun, adanya penolakan oleh masyarakat Islam Palestina mendorong adanya pertikaian perebutan wilayah Palestina yang berdasarkan sumber dari kitab beberapa agama tidak akan ada habisnya (Syah & Winarti, 2023).

Namun, di sisi lain, adanya konflik yang terjadi pada Israel bukan menjadi hambatan bagi Uni Emirat Arab untuk menjalin kerjasama dan hubungan diplomatis yang berkelanjutan dengan Israel. Hubungan yang dijalin dengan baik oleh Uni Emirat Arab dengan Israel berjalan selama kurang lebih satu tahun sebagai bentuk normalisasi hubungan konflik yang bertentangan sebagai akibat adanya upaya perluasan wilayah yang terus dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Uni Emirat Arab menjadi salah satu pihak yang menentang keras adanya hal tersebut di masa lalu dengan dasar adanya nilai kemanusiaan, dan juga alasan stabilitas internasional (Reuters, 2023).

Di sisi lain, karena adanya tujuan untuk menghentikan adanya wacana perluasan wilayah yang terus dilakukan oleh Israel, mendorong adanya upaya normalisasi dengan harapan perluasan wilayah tidak diteruskan. Hal ini juga mengacu pada kebijakan luar negeri Uni Emirat Arab yang melalui upaya normalisasi kembali menjalin kerjasama dengan Israel. Layaknya hubungan manusia di dunia, tidak ada hubungan kerjasama yang terus memberikan nilai positif bagi khalayak, melainkan juga terdapat kontra yang mewarnainya. Termasuk dalam hal hubungan kerja sama yang terjalin kembali antara Israel dan Uni Emirat Arab sebagai bentuk normalisasi hubungan yang semula diawali dengan konflik hebat di antara keduanya. Kontra muncul dalam bentuk protes dari negara-negara lain di dunia karena pada dasarnya, normalisasi yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab telah melukai perjanjian Arab Peace Initiative yang disahkan pada tahun 2002 dan dianggap telah mengingkari komitmen untuk mendukung Palestina

sebagai pihak yang dirugikan oleh Israel (AMN News, 2020).

Adanya normalisasi ini merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab sebagai mediator dan dianggap bukan sebagai negara pendukung adanya upaya invasi kepada Palestina atas kepemilikan wilayah yang digugat oleh Israel. Melainkan upaya untuk memediasi adanya upaya tersebut melalui tindakan pencegahan yang bersifat substansif dan preventif. Sehingga diharapkan adanya hubungan yang baik antara Uni Emirat Arab dengan Israel dapat menggugurkan niat Israel untuk terus menggugat dan memperluas wilayah di Palestina atas kepemilikannya (Billah, et al., 2023).

Normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab, seperti Mesir dan Yordania, telah terjadi sejak dekade sebelumnya, dimulai dengan Perjanjian Perdamaian Mesir-Israel pada 1979 setelah Perang Arab-Israel dan Perang Yom Kippur. Yordania mengikuti dengan perjanjian damai pada 1994 setelah Perang Enam Hari. Pada abad ini, normalisasi yang lebih baru terjadi dengan Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Maroko, dengan kesepakatan UEA-Israel ditandatangani pada Agustus 2020 dan Bahrain-Israel pada September 2020. Langkah ini mendapat kecaman keras dari Palestina, Iran, dan Turki, yang menilai bahwa normalisasi tersebut adalah pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina. Selain itu, normalisasi ini tidak terlepas dari pengaruh politik Amerika Serikat, khususnya di bawah kepemimpinan Donald Trump, yang berusaha meningkatkan popularitasnya menjelang pemilihan presiden dengan meraih dukungan dari komunitas Yahudi di AS (Derajat & Kurniawan, 2022).

Langkah normalisasi dianggap menjadi langkah yang paling tepat sebagaimana model aktor rasional yang disampaikan oleh Graham T. Allison. Di mana dalam hal ini, langkah atau upaya yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab merupakan langkah yang dirasa nir risiko dengan mempertimbangkan kepentingan nasional Uni Emirat Arab dalam hal stabilitas publik, perekonomian, dan juga menjadi landasan untuk memperkuat posisi strategisnya di lingkungan internasional (Ahmadi & Bumi, 2022). Oleh karenanya, adanya normalisasi ini juga memberikan dampak bagi masyarakat dunia, termasuk di antaranya yaitu masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Adanya keterhubungan antara negara-negara di Asia Tenggara dengan Israel, misalnya yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, dan juga Filipina. Dengan adanya hubungan yang baik antara Uni Emirat Arab dengan Israel akan memberikan iklim hubungan yang baik pula antara Uni Emirat Arab dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, secara konsisten mendukung penyelesaian konflik melalui pendekatan solusi dua negara sesuai dengan resolusi PBB, meskipun normalisasi hubungan diplomatik antara negara-negara Arab seperti UEA dan Bahrain dengan Israel berpotensi menantang posisi

tersebut. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa normalisasi tersebut tidak mengubah komitmennya terhadap Palestina, mendorong dialog dan negosiasi, serta berpartisipasi aktif dalam forum internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Sikap ini tercermin dalam tindakan Indonesia yang menolak kehadiran tim nasional Israel dalam acara olahraga dan mengingatkan Dewan Keamanan PBB tentang tanggung jawabnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan, menunjukkan komitmen Indonesia yang kuat terhadap nasib bangsa Palestina (Hakiem, et al., 2023).

Indonesia secara tegas menolak Abraham Accords dan membangun hubungan diplomatik dengan Israel, mengacu pada UUD 1945 yang melarang kerja sama dengan negara penjajah. Isu Israel menjadi sorotan hangat di Indonesia, terutama setelah pernyataan Anthony Blinken pada akhir 2021 yang memicu pembicaraan intensif sepanjang 2022. Sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar dan sebagai pendukung kemerdekaan Palestina, Indonesia dianggap menjadi target utama Israel setelah Arab Saudi (Kusuma, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk membahas lebih dalam berkaitan dengan harmonisasi hubungan yang terjalin antara Uni Emirat Arab dengan Israel serta dampaknya bagi kehidupan negara-negara di Asia Tenggara di lingkungan dunia internasional. Dengan begitu akan didapatkan gambaran yang jelas berkaitan dengan bagaimana awal mula terbentuknya hubungan antara Israel dengan Uni Emirat Arab serta perjalanannya hingga mengalami normalisasi serta dampak hubungan di antara keduanya bagi negara-negara yang ada di Asia Tenggara.

3. METODE

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu proses penelitian yang berlandaskan pada literatur yang sudah ada, sumber-sumber informasi yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, jurnal, artikel, tesis, dan dokumen lainnya (Nasution, 2023). Adapun analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk memberikan predikat pada variabel yang diteliti berdasarkan tolok ukur yang telah ditentukan, sering digunakan dalam penelitian evaluasi untuk menilai sejauh mana variabel sesuai dengan kriteria yang diharapkan (Hikmawati, 2020). Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang bukan didapatkan atau diperoleh dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian. Data sekunder ini bersifat pelengkap dan penguat data primer (Nasution, 2023). Penelitian akan dijelaskan dan dipaparkan secara deskriptif untuk mengetahui bagaimana awal mula terbentuknya hubungan antara Israel dengan Uni Emirat Arab serta perjalanannya hingga mengalami normalisasi serta dampak hubungan di antara keduanya bagi negara-negara yang ada di Asia Tenggara.

2. TINJAUAN TEORI

Diplomasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dan negara yg lain (www.KBBI.co.id)

Menurut G.R. Berridge (2023) diplomasi didefinisikan sebagai seni untuk menjaga hubungan internasional melalui komunikasi formal antara wakil-wakil negara. Definisi ini menekankan pentingnya komunikasi dalam menjaga dan mengelola hubungan antar negara, yang merupakan elemen krusial dalam politik internasional. Diplomasi melibatkan berbagai metode dan teknik yang digunakan untuk membangun, memelihara, dan mengembangkan hubungan antar negara. Salah satu metode utama dalam diplomasi adalah perundingan, di mana wakil negara melakukan dialog untuk mencapai kesepakatan atau menyelesaikan konflik. Perundingan ini dapat mencakup berbagai isu, mulai dari perdagangan, keamanan, hingga hak asasi manusia.

Dalam hukum internasional, telah diatur mengenai hubungan yang terjalin antara satu negara dengan negara-negara lain di dunia. Hubungan ini dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan antara negara-negara yang bersangkutan. Umumnya, hubungan ini didasari pada adanya kebutuhan yang dimiliki oleh setiap negara. Namun, karena adanya keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkanlah hubungan internasional dengan negara lain dalam bentuk sistem timbal balik, yang mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan negara itu sendiri serta kepentingan bersama.

Adanya kerjasama yang terjalin umumnya juga menyebabkan adanya ketergantungan antar negara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dengan begitu, kerjasama yang berlangsung dalam jangka waktu lama akan sangat sulit untuk diputuskan karena adanya ketergantungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kerjasama ini biasanya meliputi bidang perekonomian, keamanan dan pertahanan, pendidikan, politik, serta sosial budaya (Polanunu, et.al, 2023).

Hubungan antar negara tidak hanya dilihat dari kerjasama yang terjalin saja, tetapi juga terkadang terdapat konflik di antara mereka. Konflik ini didasari oleh permasalahan-permasalahan yang timbul akibat perselisihan, baik dalam dunia politik maupun keamanan. Dengan adanya konflik ini, stabilitas dalam sistem kerjasama internasional dapat terancam. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang bersangkutan, tetapi juga dapat memberikan pengaruh kepada negara-negara lain yang berdekatan, baik secara geografis maupun dalam hal hubungan bilateral.

Sehingga, sangat mudah kita temui adanya persekutuan negara-negara yang saling melawan dan membentuk kubu untuk saling melakukan blokade guna mengalahkan lawan. dan membentuk kubu untuk saling melakukan blokade guna mengalahkan lawan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konflik Israel dan Palestina

Adapun konflik yang terjadi dalam diri Israel adalah perseteruan yang terjadi selama bertahun-tahun dengan Palestina sebagai akibat dari konflik perebutan wilayah yang sudah terjadi sejak adanya Perang Dunia I. Konflik ini merupakan dampak dari adanya penyerahan wilayah Palestina oleh Inggris kepada bangsa Yahudi, yaitu masyarakat dengan agama samawi, yang kemudian menganggap bahwa Palestina telah menjadi milik masyarakat bangsa Yahudi. Namun, adanya penolakan oleh masyarakat Islam Palestina mendorong adanya pertikaian perebutan wilayah Palestina yang berdasarkan sumber dari kitab beberapa agama tidak akan ada habisnya (Prihatna & Lewoleba, 2024).

Masyarakat Islam Palestina menyebutkan bahwa upaya untuk menyerahkan wilayah kepada masyarakat Yahudi untuk didirikan negara samawi merupakan bentuk pemaksaan dan bertentangan dengan keinginan masyarakat Palestina. Permasalahan ini berlanjut hingga pada peristiwa Perang Dunia II, di mana pada masa kekejaman Hitler yang menewaskan kurang lebih enam juta penganut Yahudi di Eropa, jutaan warga Eropa melakukan migrasi ke Palestina untuk menyelamatkan diri (Firdaus & Nuraeni, 2023). Namun, karena adanya upaya pembatasan imigran yang tertera dalam sebuah traktat yang disebut dengan perjanjian kertas putih atau White Paper pada 1939, hanya diperbolehkan adanya arus imigrasi sebanyak 75 ribu orang hingga tahun 1944. Hal ini mendorong adanya imigran gelap yang memaksa untuk dapat masuk ke Palestina untuk menghindari adanya pemusnahan massal yang ada di Eropa oleh Hitler dan kawanannya Nazi (Wibowo, 2021).

Para imigran gelap ini kemudian ditangkap dan ditahan di kamp-kamp pengungsian di wilayah Siprus. Tidak hanya di Siprus, penahanan juga dilakukan di Palestina dan juga Mauritius. Adanya penahanan ini membuat pihak Yahudi tidak terima, sehingga bermunculan teror sebagai bentuk protes atas penahanan yang dilakukan terhadap imigran. Teror ini diinisiasi oleh kawanannya sayap kanan Zionis yang mendesak pihak Inggris untuk segera membukakan pintu imigrasi bagi Yahudi (Bagaskara, 2023).

Adanya permasalahan imigrasi ini terus berlanjut hingga munculnya rekomendasi Komite Gabungan PBB yang menyarankan adanya migrasi 100 ribu orang Yahudi untuk berpindah ke Palestina, namun upaya ini ditolak oleh pemerintah Arab karena akan mengganggu stabilitas internal masyarakat Palestina. Perkara ini tidak dapat diselesaikan oleh Inggris, sehingga konflik migrasi yang berujung pada perebutan wilayah ini masih berlanjut hingga saat ini (Encyclopædia Britannica, 2024). Pada tahun 1948, Yahudi sebagai pihak imigran malah mendeklarasikan terbentuknya negara Israel di tubuh negara Palestina. Hal ini mendorong adanya konflik yang terus bergemuruh antara Israel dan Palestina, sekaligus melibatkan negara-negara yang memiliki hubungan dengan kedua negara tersebut dalam lingkup dunia internasional

Hal ini pula yang menjadi batu sandungan kerjasama internasional yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab dengan Israel, yaitu masa lalu yang masih terus berlangsung hingga saat ini dan tidak kunjung ditemukan solusi atas hal tersebut. Namun, diharapkan hubungan baik yang diharmonisasi antara Israel dengan Palestina dapat memberikan dorongan yang positif bagi kehidupan masyarakat Palestina dan keterhubungannya dengan Israel sebagai pihak antagonis yang menjadi pandangan mutlak masyarakat internasional, termasuk pemerintah Indonesia (Wibowo, 2021).

Harmonisasi hubungan di antara keduanya harus dipupuk, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya hati yang luluh dari Israel untuk menghentikan upaya invasi yang menyebabkan adanya kematian yang tidak sedikit jumlahnya bagi masyarakat Palestina..

b. Diplomasi Uni Emirat Arab dengan Israel

Hubungan yang dijalin dengan baik oleh United Emirat Arab dengan Israel berjalan selama kurang lebih satu tahun sebagai bentuk normalisasi hubungan konflik yang bertentangan sebagai akibat adanya upaya perluasan wilayah yang terus dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Uni Emirat Arab menjadi salah satu pihak yang menentang keras adanya hal tersebut di masa lalu dengan dasar adanya nilai kemanusiaan, dan juga alasan stabilitas internasional (Arif & Zaman, 2023).

Hubungan diplomasi Uni Emirat Arab pada dasarnya bukan merupakan hubungan yang baik. Karena Uni Emirat Arab merupakan satu rumpun dengan Palestina di tanah Arab yaitu Timur Tengah yang mana merupakan keluargabangsa Arab yang merasa stabilitasnya dirugikan akibat kehadiran Yahudi yang saat ini telah mendeklarasikan diri sebagai negara yang disebut Israel. Sebagai negara yang memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat dekat dengan Palestina, Uni Emirat Arab menentang upaya perebutan wilayah oleh Israel kepada Palestina. Hal ini dibuktikan adanya boikot - boikot yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab terhadap Israel. Baik dalam hal perekonomian, kerjasama dagang, pertahanan keamanan, dan juga kerjasama dalam hal - hal lainnya (Arif & Zaman, 2023)..

Adanya normalisasi ini merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab sebagai mediator dan dianggap bukan sebagai negarapendukung adanya upaya invasi kepada Palestina atas kepemilikan wilayah yang digugat oleh Israel. Melainkan upaya untuk memediasi adanya upaya invasi tersebut melalui tindakan pencegahan yang bersifat substansif dan preventif. Sehingga diharapkan adanya hubungan yang baik antara Uni Emirat Arab dengan Israel dapat menggugurkan niat Israel untuk terus menggugat dan memperluas wilayah di Palestina atas kepemilikannya (Multiningtyas, 2020).

Disisi lain karena adanya tujuan untuk menghentikan adanya wacana perluasan wilayah yang terus dilakukan oleh Israel mendorong adanya upaya normalisasi dengan harapan perluasan wilayah tidak diteruskan (AMNNews, 2020). Hal ini juga mengacu pada kebijakan luar negeri Uni Emirat Arab

yang dengan melalui upaya normalisasi kembali menjalin kerjasama dengan Israel.

Langkah normalisasi dianggap menjadi langkah yang paling tepat sebagaimana model aktor rasional yang disampaikan oleh Graham T. Allison. Dimana dalam hal ini, langkah atau upaya yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab merupakan langkah yang dirasa nir resiko dengan mempertimbangkan kepentingan nasional Uni Emirat Arab dalam hal stabilitas publik, perekonomian, dan juga menjadi landasan untuk memperkuat posisi strategisnya di lingkungan internasional. Hubungan baik yang diharmonisasi antara Israel dengan palestina diharapkan dapat memberikan dorongan yang positif bagi kehidupan masyarakat palestina dan keterhubungannya dengan Israel sebagai pihak antagonis yang menjadi pandangan mutlak masyarakat internasional termasuk pemerintah Indonesia (Ardinata, 2022).

Dalam hal ini harmonisasi hubungan diantara keduanya harus dipupuk, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya hati yang luluh dari Israel untuk menghentikan upaya invasi yang menyebabkan adanya kematian yang tidak sedikit jumlahnya bagi masyarakat Palestina.

c. Dampak Hubungan Diplomasi Uni Emirat Arab Bagi Indonesia

Hubungan baik yang terjalin kembali antara Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel melalui Abraham Accords dapat berdampak signifikan pada kebijakan luar negeri Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi yang unik dalam diplomasi Timur Tengah, terutama terkait dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Sebagai negara yang menolak adanya upaya invasi dan perebutan wilayah Palestina oleh Israel, Indonesia tidak lantas goyah melihat adanya kerjasama yang terjalin antara United Emirat Arab dan Israel. Dan menurut pengamat publik, bahwasanya hubungan yang terjalin antara Uni Emirat Arab dengan Israel tidak akan mempengaruhi hubungan antara Indonesia dengan negara-negara di Timur Tengah seperti Sudan dan Bahrain (Roni & Aufiya, 2023).

Dampak adanya normalisasi hubungan antara Israel dengan Uni Emirat Arab sebetulnya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara sebagaimana yang telah disebutkan diatas, melainkan dengan setiap negara di Asia Tenggara dan juga negara-negara di dunia yang menjalin hubungan dengan Israel, dan juga negara-negara yang sudah berhubungan dengan Uni Emirat Arab. Dampak yang dirasakan tidakhanya bersifat positif, melainkan juga dampak-dampak negatif seperti misalnya hilangnya kepercayaan terhadap Uni Emirat Arab dalam menjamin nilai Hak Asasi Manusia masyarakat Palestina yang telah diciderai oleh Israel, dan juga menurunnya pandangan baik masyarakat internasional terhadap Uni Emirat Arab yang dianggap pro dan mendukung adanya upaya invasi dan perebutan wilayah Palestina oleh Israel (Hakiem, et.al, 2023). Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menegaskan bahwa Indonesia akan terus mendukung

perjuangan rakyat Palestina untuk keadilan dan kemerdekaan. Bahkan, meskipun ada wacana dari pihak Amerika Serikat untuk mendorong normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel, Indonesia tetap mempertahankan posisinya yang mendukung solusi dua negara sesuai dengan parameter internasional (BBC News, 2024).

Normalisasi hubungan diplomatik antara negara-negara Arab dan Israel telah mengubah dinamika politik di Timur Tengah, dengan beberapa pihak menilainya sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina. Meski memahami keputusan negara-negara Arab, Indonesia tetap konsisten memperjuangkan hak-hak Palestina berdasarkan Resolusi PBB dan Arab Peace Initiative. Kebijakan luar negeri Indonesia, terutama terkait konflik Israel-Palestina, tidak terpengaruh secara signifikan oleh normalisasi ini. Namun, normalisasi tersebut dapat memengaruhi opini publik di Indonesia, dengan sebagian masyarakat mungkin mempertimbangkan manfaat ekonomi dari normalisasi hubungan Indonesia-Israel, meski dukungan terhadap Palestina masih kuat.

d. Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait dengan Diplomasi di Kawasan Timur Tengah

Salah satu pilar utama kebijakan diplomasi Indonesia di kawasan Timur Tengah adalah dukungan yang konsisten terhadap perjuangan Palestina. Indonesia secara tegas mendukung hak-hak bangsa Palestina untuk merdeka dan memperoleh keadilan. Dukungan ini tidak hanya disuarakan dalam pernyataan resmi pemerintah, tetapi juga diperjuangkan secara aktif di forum-forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Indonesia memandang masalah Palestina sebagai isu yang sangat penting, sejalan dengan nilai-nilai kemerdekaan dan keadilan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Indonesia juga menjalin hubungan bilateral yang kuat dengan berbagai negara di Timur Tengah. Hubungan historis dan ikatan keagamaan menjadi modal penting dalam mempererat kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Indonesia memiliki hubungan ekonomi yang berkembang dengan negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir, terutama di sektor energi, pariwisata, dan tenaga kerja. Melalui kerjasama ini, Indonesia tidak hanya memperluas pengaruh diplomatiknya, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang signifikan (Kemenlu, 2024).

Indonesia juga berperan aktif dalam diplomasi multilateral di Timur Tengah. Indonesia mendorong dialog dan negosiasi sebagai solusi untuk mengatasi berbagai konflik yang terjadi di kawasan ini, seperti konflik di Suriah, Yaman, dan Libya. Melalui peran di PBB dan berbagai organisasi internasional lainnya, Indonesia berupaya meredakan ketegangan dan mempromosikan perdamaian dengan cara-cara damai. Pendekatan diplomasi multilateral ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas kawasan serta

kepatuhannya terhadap hukum internasional (Susanto, 2024).

Indonesia secara aktif berupaya meredakan ketegangan dan konflik di Timur Tengah melalui diplomasi yang mendorong deeskalasi. Indonesia menyerukan pengendalian diri dari negara-negara yang terlibat dalam konflik, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti dalam kasus ketegangan Iran-Saudi atau konflik bersenjata di Yaman. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan dengan cara-cara damai dan diplomatik, serta menghindari penggunaan kekuatan militer sebagai solusi (Susanto, 2024).

Meski belum menjadi mediator resmi dalam konflik Israel-Palestina, Indonesia memainkan peran penting dalam mendukung upaya perdamaian di Timur Tengah. Pemerintah Indonesia memanfaatkan posisinya sebagai negara yang pernah mengalami penjajahan untuk mendorong dialog perdamaian di Timur Tengah. Selain itu, Indonesia juga aktif mempromosikan solusi dua negara sebagai jalan keluar dari konflik Israel-Palestina (Wahyudi, 2024).

Indonesia memahami keputusan negara-negara Arab yang menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, namun tetap konsisten dalam memperjuangkan hak-hak Palestina. Meskipun tidak mengambil langkah yang sama, Indonesia menghormati keputusan negara-negara tersebut dan tetap mendorong penyelesaian konflik Palestina-Israel melalui resolusi PBB dan solusi damai yang adil. Kebijakan diplomasi Indonesia di Timur Tengah juga dipengaruhi oleh opini publik dalam negeri yang mendukung perjuangan Palestina. Pemerintah Indonesia mempertimbangkan aspirasi masyarakatnya dalam merumuskan kebijakan luar negeri terkait Timur Tengah, terutama dalam menjaga konsistensi dukungan terhadap Palestina, meskipun ada tekanan dari perubahan dinamika internasional seperti normalisasi hubungan Arab-Israel (Wahyudi, 2024).

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat diketahui bahwa kebijakan diplomasi Indonesia di Timur Tengah berfokus pada dukungan konsisten terhadap perjuangan Palestina untuk merdeka dan memperoleh keadilan, yang diperjuangkan di forum internasional seperti PBB dan OKI. Selain itu, Indonesia menjalin hubungan bilateral yang kuat dengan negara-negara di Timur Tengah, terutama di bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan, serta berperan aktif dalam diplomasi multilateral untuk meredakan ketegangan dan mempromosikan perdamaian di kawasan tersebut. Melalui pendekatan damai dan diplomatik, Indonesia mendorong deeskalasi konflik seperti di Yaman dan Suriah. Meski belum menjadi mediator resmi dalam konflik Israel-Palestina, Indonesia tetap mendukung solusi dua negara dan menghormati keputusan negara Arab yang menormalisasi hubungan dengan Israel, sambil mempertahankan komitmen pada dukungan terhadap Palestina. Kebijakan ini juga dipengaruhi oleh opini publik domestik yang kuat dalam mendukung Palestina.

4. KESIMPULAN

Uni Emirat Arab yang dengan melalui upaya normalisasi kembali menjalin kerjasama dengan Israel. Layaknya hubungan manusia di dunia, tidak ada hubungankersama yang terus memberikan nilai positif bagi khalayak, melainkan juga terdapat kontra yang mewarnainya. Termasuk dalam hal hubungan kerja sama yang terjalin kembali antara Israel dan Uni Emirat Arab sebagai bentuk normalisasi hubungan yang semula diawali dengan konflik hebat diantara keduanya. Kontramuncul dalam bentuk protesme dari negara - negara lain di dunia karena padadasarnya, normalisasi yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab telah melukai perjanjian Arab Peace Initiative yang disahkan pada tahun 2002 dan dianggap telah mengingkari komitmen untuk mendukung Palestina sebagai pihak yang dirugikan oleh Israel.

Menanggapi hal tersebut, kebijakan pemerintah Indonesia terkait diplomasi di kawasan Timur Tengah, khususnya mengenai hubungan antara Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel, Indonesia tetap berpegang pada prinsip solidaritas terhadap Palestina dan penolakan terhadap penjajahan. Meskipun normalisasi hubungan antara UEA dan Israel telah terjadi, Indonesia menegaskan posisinya untuk mendukung penyelesaian konflik berdasarkan resolusi PBB dan solusi dua negara, tanpa mengubah komitmennya terhadap nasib rakyat Palestina. Sikap ini tercermin dalam berbagai langkah diplomatik yang diambil, termasuk partisipasi aktif dalam forum internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan penolakan terhadap kehadiran tim nasional Israel dalam acara olahraga. Meskipun ada potensi dampak positif dari normalisasi hubungan UEA-Israel terhadap stabilitas di Asia Tenggara, Indonesia tetap waspada terhadap kemungkinan dampak negatif, seperti hilangnya kepercayaan terhadap komitmen UEA dalam isu-isu hak asasi manusia. Dengan demikian, kebijakan luar negeri Indonesia di kawasan ini menunjukkan konsistensi dalam mendukung keadilan bagi Palestina sambil mendorong dialog dan diplomasi sebagai solusi atas konflik yang berkepanjangan.

Pemerintah Indonesia disarankan untuk terus memperkuat perannya sebagai mediator dalam konflik Israel-Palestina dengan memanfaatkan posisinya yang strategis di kawasan Timur Tengah dan hubungan baik dengan negara-negara Arab. Selain itu, Indonesia perlu aktif dalam menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara untuk membangun solidaritas regional terhadap Palestina, termasuk melalui forum-forum internasional seperti OKI dan ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspu*, 6(1), 974-980.

- ARDINATA, M. D. R. (2022). Analisis Kebijakan Indonesia Untuk Menormalisasi Kembali Kerjasama Militer Indonesia-Australia 2016-2021 Melalui Perspektif Rational Actor Model.
- Arif, S. M., & Zaman, A. N. (2023). Analisis Kepentingan Nasional Uni Emirat Arab Melakukan Proses Normalisasi Hubungan Diplomatik Dengan Israel 2020. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(1), 8-18.
- Ahmadi, S. (2022). Normalisasi Hubungan Diplomatik Uni Emirat Arab – Israel: Analisis Rasionalitas Kebijakan Politik Luar Negeri Uni Emirat Arab. *Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 5 (2), E-ISSN:2657-1560.
- BBC News Indonesia. (2021, December 24). Normalisasi hubungan Israel dan Indonesia disinggung Menu AS saat ke Jakarta - BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59777869>.
- Bakry, u. S. (2017). Dasar-dasar hubungan internasional edisi pertama. Kencana.
- Berridge, G. R. (2023). *DIPLOMASI, Teori dan Praktik*. Penerbit Andi.
- Bagaskara, F. S. (2023). Ideologi dan Politik Identitas. *Jurnal ICMES*, 7(2), 177-200.
- Carlsnaes, w., risse, t., & simmons, b. A. (2015). *Handbook hubunganinternasional*. Nusamedia.
- Derajat, a. Z., & kurniawan, t. (2022). Normalisasi hubungan israel dan arab dalamkonteks israel-palestina. *Jurnal ilmiah hubungan internasional*, 18(2), 133- 149.
- Firdausi, D. A., & Nuraeni, N. (2023). Perlawanan Diaspora Yahudi Sulawesi Utara Terhadap Antisemitisme Melalui Museum Holocaust Indonesia. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 5(2), 95-111.
- Hadiwinata, b. S. (2017). Studi dan teori hubungan internasional: arus utama, alternatif, dan reflektifis. Yayasan pustaka obor indonesia.
- Huda, N., & Afrita, J. (2023). Pentingnya Bahasa Arab Dalam Pendidikan Diplomasi Dan Hubungan Internasional. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(11), 1242-1252.
- Hakiem, F.N., L.D.M. Putri & N.A. Gustiami. (2023). Dampak Normalisasi Hubungan Diplomatik Israel Dan Negara-Negara Arab Terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Timur Tengah. *Jurnal Dinamika Global*, 8 (2), P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399.
- Hikmawati, Fenti. (2020). *Metodologi Penelitian*, Cetakan ke-4. Depok: PT. RajaGrafindo Persada
- Istiqomah, n. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan normalisasi hubungan antara uni emirat arab dan israel pada tahun 2020 (doctoral dissertation, universitas Muhammadiyah yogyakarta).
- Murtiningtyas, E. W. Kebijakan Amerika Serikat Mengupayakan Normalisasi Hubungan Diplomatik Israel Dengan Uni Emirat Arab (Uea), Bahrain, Sudan, Dan Maroko Melalui Abraham Accords Tahun 2020 (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Nasution, Abdul Fatah. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harva Creative
- Olivia, y. (2013). Level analisis sistem dan teori hubungan internasional. *Transnasional*, 5(01), 890-907.dugis, v. (ed.). (2018). *Teori hubungan internasional: perspektif-perspektif klasik edisi revisi*. Airlangga university press.
- Polanunu, Z. I., Tuhulele, P., & Tahamata, L. C. O. (2023). Pengaturan Tentang Standar Minimum Bagi Pelaku Spionase Dalam Hukum Internasional. *PATTIMURA Law Study Review*, 1(1), 46-53.
- Prihatna, C. N., & Lewoleba, K. K. (2024). Analisis Peran Mahkamah Internasional Pbb Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Genosida Oleh Israel Terhadap Palestina. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(1), 11-20.
- Rimapradesi, y., & sahide, a. (2021). Kepentingan negara-negara arab (uni emirat arab, bahrain, sudan dan maroko) melakukan normalisasi hubungan dengan israel. *Mandala: jurnal ilmu hubungan internasional*, 4(1).
- Reynaldi, d. R. (2021). Analisis faktor yang memfasilitasi normalisasi hubungan diplomatik uni emirat arab-israel (doctoral dissertation, universitas andalas).
- Reuters. (2023, November 12). Konflik Gaza Tak Goyahkan Hubungan Diplomatik UEA-Israel. *VOA Indonesia; VOA Indonesia | Berita AS, Dunia, Indonesia, Diaspora Indonesia di AS*. <https://www.voaindonesia.com/a/konflik-gaza-tak-goyahkan-hubungan-diplomatik-uea-israel-/7351572.html>
- Roji, N. F., & Aufiya, M. A. (2023). Kepentingan Israel Dalam Kerjasama Perdagangan Bebas Dengan Uni Emirat Arab (Uea) Tahun 2022. *Indonesian Journal of International Relations*, 7(1), 50-76.

- Saeri, m. (2012). Teori hubungan internasional sebuah pendekatan paradigmatik. *Jurnal transnasional*, 3(02).
- Syafitra, a. (2022). Pengaruh normalisasi hubungan israel dengan negara-negara arab terhadap dinamika geopolitik di timur tengah (doctoral dissertation, fisip unpas).
- Tahmi, A. R., Rosyidin, M., & Faiza, M. (2022). Analisis Kepentingan Nasional Uni Emirat Arab Dalam Normalisasi Hubungan Dengan Israel. *Journal of International Relations*, 8(3), 325-333.
- United Nations Resolution 181. (2024). Palestine, History, Partition, Summary, & Map | Britannica. (2024). In *Encyclopædia Britannica*.
<https://www.britannica.com/topic/United-Nations-Resolution-181>.
- Vendy Yhulia Susanto. (2024, April 16). Intensifkan Upaya Diplomasi, Indonesia Dorong De eskalasi Ketegangan di Timur Tengah. *Kontan.co.id*; *Kontan*.
<https://nasional.kontan.co.id/news/intensifkan-upaya-diplomasi-indonesia-dorong-de eskalasi-ketegangan-di-timur-tengah>
- Wicaksono, R. M. T. A. D. (2020). Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel. *Jurnal ICMES*, 4(2), 171-194.
- Wibowo, H. (2021). Mengapa Palestina Gagal Merdeka?. *Neosphere Digdaya Mulia*.
- Wangke, H. (2021). Diplomasi digital dan kebijakan luar negeri Indonesia. *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.
- Wahyudi, Heru. (2024). Perjalanan Diplomasi Indonesia di Konflik Timur Tengah. *Rmol.id*.
<https://rmol.id/publika/read/2024/10/09/640065/perjalanan-diplomasi-indonesia-di-konflik-timur-tengah>